

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- SKPD : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
- Visi : Mewujudkan Ketenagakerjaan yang Mandiri, Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera untuk Semua
- Misi : 1. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja untuk Mengisi dan Memperluas Peluang serta Kesempatan Kerja melalui Pemberdayaan Usaha Mandiri;  
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja melalui Pelatihan Kerja yang Berbasis Kompetensi dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja;  
3. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
- Tugas Pokok : Merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan meliputi perencanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
- Fungsi : 1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktifitas tenaga kerja, seerta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;  
2. Pelaksanaan pengendalian operasional di bidang perencanaan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja, pelatihan, produktifitas tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;  
3. Pelaksanaan koordinasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja serta pelayanan perizinan di bidang ketenagakerjaan;  
4. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;  
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya  
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. □

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	1. Persentase penempatan tenaga kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Bid. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Laporan AKL, AKAD, AKAN	$\frac{\sum \text{pencari kerja yg ditempatkan}}{\sum \text{pencari kerja yg mendaftar}} \times 100\%$
		2. Persentase peningkatan tenaga kerja mandiri	Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Bid. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Laporan Binaan Kelompok Usaha Mandiri	$\frac{\text{Selisih } \sum \text{KUM thn ini dgn KUM tahun sebelumnya}}{\sum \text{KUM tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		3. Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja & Produktifitas Ketenagakerjaan	Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan	Bid. Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas	Laporan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang disebarluaskan
2	Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	1. Persentase tenaga kerja yang terampil dan berkompotensi dasar	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang berkompotensi spesifik level Asean	Bid. Pelatihan Kerja	Laporan Pelatihan Kerja	$\frac{\sum \text{pendaftar pelatihan kerja yang lulus ujian}}{\sum \text{pendaftar pelatihan}} \times 100\%$
		2. Persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level ASEAN	Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja & Produktifitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang berkompotensi spesifik level Asean	Bid. Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktifitas	Laporan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja	$\frac{\sum \text{Peserta pelatihan peningk. Produktifitas yang tersertifikasi kerja}}{\sum \text{Peserta pelatihan peningkatan produktifitas}} \times 100\%$
3	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	1. % Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama □	Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Bid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\sum \text{kasus perselisihan HI yang diselesaikan dengan perjanjian bersama}}{\sum \text{kasus perselisihan yang dilaporkan}} \times 100\%$

		2. % Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (HI)	Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Bid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Selisih } \sum \text{ kasus perselisihan HI thn ini dgn tahun sebelumnya}}{\sum \text{ kasus perselisihan HI tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		3. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang di laporkan	Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Bid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan PP yang terdaftar	Jumlah peraturan perusahaan yang di laporkan
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	1. % Peningkatan Upah Minimum Kota (UMK)	Pengembangan Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Bid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan Upah Minimum Kota	$\frac{\text{Selisih } \sum \text{ UMK thn ini dgn UMK tahun sebelumnya}}{\sum \text{ UMK tahun sebelumnya}} \times 100\%$
5	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat	Laporan Kegiatan	Nilai Indeks Kepuasan Publik
		2. Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Sekretariat	Laporan Inventaris Barang	$\frac{\sum \text{ Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai}}{\sum \text{ Sarana dan Prasarana yang tersedia}} \times 100\%$
		3. Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Pegawai	Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kehadiran Pegawai	Sekretariat	Laporan Kepegawaian	$\frac{\sum \text{ PNS yang mendapatkan pakaian dinas pegawai}}{\sum \text{ PNS Dinas Tenaga Kerja}} \times 100\%$
		4. Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi dibidangnya	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Cakupan Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan Kompeten dibidangnya	Sekretariat	Laporan Kegiatan	$\frac{\sum \text{ Aparatur yang mendapatkan pelatihan}}{\sum \text{ Aparatur pada Dinas}} \times 100\%$
		5. Persentase Capaian Kinerja yang Termuat dalam Citizen Charter	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Sekretariat	Laporan Kegiatan	$\frac{\sum \text{ Capaian Kinerja yang Termuat dalam Citizen Charter}}{\sum \text{ Target Kinerja yang Termuat dalam Citizen Charter}} \times 100\%$

Makassar, 2018  
KEPALA DINAS



**Drs A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19690322 199303 1 005



